

BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. Kesimpulan

Secara umum, berdasarkan data Sensus Penduduk 1971-1990 perkembangan struktur ketenagakerjaan anak propinsi Jawa Barat menunjukkan terjadinya peningkatan penduduk usia 10-14 tahun baik laki-laki maupun perempuan selama dua dekade terakhir. Berdasarkan tempat tinggal, tenaga kerja anak di kota mengalami peningkatan sejak tahun 1971, bahkan pada periode 1980-1990 peningkatannya mencapai dua kali lipat. Angkatan kerja anak di kota mengalami peningkatan yang cukup besar dan sebaliknya di desa mengalami penurunan. Pola ini tidak berubah jika dikontrol dengan variabel jenis kelamin. Artinya bahwa angkatan kerja anak baik laki-laki maupun perempuan di kota mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan di desa yang mengalami penurunan.

Kecenderungan serupa juga terjadi pada perkembangan jumlah anak yang bekerja. Peningkatan jumlah anak yang bekerja di kota jauh lebih tinggi daripada di desa dan jumlah anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki.

Gambaran tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan demografis dan sosial ekonomi yang telah berlangsung di Jawa Barat selama dua dekade terakhir belum mampu menurunkan jumlah tenaga kerja anak, angkatan kerja anak dan jumlah anak bekerja. Meskipun demikian hal ini juga diiringi oleh meningkatnya jumlah anak yang bersekolah. Artinya adalah bahwa program Wajib Belajar cukup menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Sedikitnya terdapat dua hal penting yaitu: pertama, tenaga kerja anak akan cenderung berakumulasi di kota dan implikasi sosial terhadap akumulasi tersebut juga akan semakin meluas di kota. Kedua, meningkatnya angkatan kerja anak laki-laki perlu memperoleh perhatian tersendiri.

Terdapat variasi jumlah angkatan kerja anak dan jumlah angkatan kerja anak yang bekerja menurut Daerah Tingkat II dan Wilayah Pembangunan di Jawa Barat. Posisi jumlah angkatan kerja anak terbanyak berturut-turut adalah WP Bandung Raya, WP Botabek dan WP Cirebon. Meskipun memiliki jumlah terbesar, namun tingkat pertumbuhannya sangat rendah bahkan negatif (kecuali WP Botabek). Variasi jumlah angkatan kerja anak dan jumlahnya yang bekerja lebih terlihat menurut Daerah Tingkat II.

PDRB perkapita merupakan parameter yang dianggap dapat mencerminkan status ekonomi masyarakat secara umum. Menurut hasil pembahasan disimpulkan bahwa keterkaitan antara PDRB perkapita dengan jumlah angkatan kerja anak dan jumlah mereka yang bekerja menurut Wilayah Pembangunan menunjukkan hasil yang bertentangan dengan asumsi umum yang mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara PDRB perkapita di satu sisi dengan jumlah angkatan kerja anak dan jumlah mereka yang bekerja di sisi lainnya. Sementara analisis korelasi menurut Daerah Tingkat II menunjukkan hubungan yang negatif dengan tingkat hubungan sedang.

Kesejahteraan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk dapat mencegah keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat mencegah anak-anak yang terpaksa terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk ikut menanggung beban ekonomi yang berat, jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru menyebabkan semakin timpangnya kesenjangan antar lapisan masyarakat.

Dari analisis mikro terlihat bahwa penyerapan pekerja anak di Jawa Barat sebagian besar berada di daerah pedesaan dan sisanya berada di daerah perkotaan. Meskipun Jawa Barat telah mengalami perubahan struktur produksi dimana sektor industri telah mampu memberikan sumbangan terbesar terhadap total PDRB daerah, namun struktur kesempatan kerja yang

tercipta lebih banyak banyak diserap oleh sektor jasa. Performansi ketenagakerjaan secara umum di Jawa Barat hanya terjadi di daerah perkotaan.

Di daerah pedesaan sebagian besar pekerja anak terserap pada sektor pertanian, kemudian pada sektor jasa, dan sisanya terserap pada sektor industri. Sedangkan di perkotaan, performansi ketenagakerjaan anak menunjukkan karakteristik struktur ketenagakerjaan secara umum di Jawa Barat. Sebagian besar pekerja anak di perkotaan terserap di sektor jasa dan sisanya berturut-turut bekerja di sektor industri dan sektor pertanian.

Penyerapan menurut status pekerjaan, anak-anak cenderung memasuki sektor informal, baik di desa maupun di kota. Faktor demografi dan sosial ekonomi pekerja anak juga menyebabkan perbedaan penyerapan menurut sektor dan status pekerjaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Distribusi penyerapan pekerja anak menurut lapangan usaha dan status pekerjaan menunjukkan variasi antar Wilayah Pembangunan.

Tempat tinggal desa-kota, umur dan jenis kelamin, lapangan usaha, status pekerjaan dan kondisi ekonomi juga menyebabkan perbedaan dalam pemanfaatan pekerja anak. Lebih dari separo proporsi pekerja anak di pedesaan bekerja kurang dari 24 jam per minggunya. Di perkotaan, hampir 60 persen pekerja anaknya mencurahkan waktu lebih dari 24 jam perminggu untuk bekerja. Kelompok umur anak yang relatif lebih dewasa, sektor ekonomi modern (industri dan jasa serta sektor formal), kondisi ekonomi yang marjinal cenderung mengakibatkan pemanfaatan pekerja anak yang eksploitatif bila mengacu pada batasan jam kerja maksimal selama 24 jam perminggu. Rata-rata pemanfaatan pekerja anak pada tiap Wilayah Pembangunan di Jawa Barat cukup tinggi, kecuali pada WP Banten. Jam kerja yang panjang bagi pekerja anak di sektor ekonomi modern merupakan kenyataan yang seharusnya dicegah dan dilarang.

6.2. Implikasi Kebijakan

Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat melakukan pemberdayaan terhadap pekerja anak sebagaimana kodrat mereka sebagai individu yang belum dewasa. Semua ini bertolak dari pemikiran bahwa anak merupakan modal utama keberlangsungan dan peningkatan kehidupan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus di masa depan. Oleh karena itu, anak berhak mendapat perlindungan dan bimbingan dalam pertumbuhan dan perkembangannya supaya mereka dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setiap anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya dan bantuan dana dan daya untuk mengikuti pendidikan dan perlindungan sehingga dapat hidup aman dan tentram dalam keluarga dan masyarakat. Mereka juga berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi secara ekonomi. Untuk itu, peraturan (perundangan) dalam ketenagakerjaan perlu mencantumkan masalah pekerja anak sebagai salah satu sasaran sentral.

Pemerintah dan masyarakat perlu mempromosikan dan memasyarakatkan program Wajib Belajar 9 Tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) dan pengentasan kemiskinan melalui usaha memberdayakan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Apabila mereka sejahtera, maka diharapkan dapat memperkecil jumlah anak-anak yang terpaksa bekerja. Hal yang sangat penting adalah memberdayakan kaum miskin dengan meningkatkan akses mereka terhadap sumberdaya produktif dan pelayanan sosial dasar, meningkatkan keterkaitan antara kebijakan dan program pemerintah tentang pekerja anak dan pemberdayaan anak (tidak hanya pemberdayaan pada wanita) serta program pengentasan kemiskinan, selain perluasan kesempatan kerja bagi orang dewasa.

Program Wajib Belajar 9 Tahun hendaknya diusahakan agar lebih dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga miskin. Pendidikan Dasar 9 Tahun ini, jika perlu diadakan dengan mengeliminasi biaya-biaya pendidikan



yang masih dirasa memberatkan untuk kelompok miskin seperti sumbangan uang sekolah diluar SPP, buku-buku, seragam sekolah dan sejenisnya. Program ini sejalan dengan dengan Konvensi Hak Anak Artikel 28, Paragraf 1 A dan B.

Selain itu penting juga advokasi untuk mendorong institusi-institusi formal produktif agar lebih bertanggung jawab atas tindakannya bila mempekerjakan anak dan penyadaran masyarakat agar memerangi seluruh bentuk pekerjaan anak yang eksploitatif.